

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Riset tentang konstruksi makna pemberdayaan pemuda dan penguatan demokrasi inklusif terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum serta tujuan yang tidak ambigu. Dalam penentuan keseluruhan akan digambarkan gambaran keseluruhan dari hasil pemeriksaan, sehingga tidak diurutkan berdasarkan rencana masalah. Pada bagian akhir akan dipaparkan tentang dampak lanjutan dari pemeriksaan yang bersifat eksplisit, karena hal tersebut bergantung pada detail dari masalah eksplorasi yang masih mengudara. Jelas untuk menjadi agen, akan dididik, sebagai berikut:

5.1.1 Simpulan Umum

Demokrasi yang inklusif yang menjadi kritikan terhadap sistem demokrasi yang ada saat ini, lalu hal tersebut juga berlaku pada pemuda sebagai salah satu komponen pendukung terwujudnya demokrasi inklusif, sehingga dibutuhkan pemerataan sumber daya pemuda agar dapat mewujudkan tujuan tersebut. Sumber daya pemuda akan terwujud dengan adanya upaya pemberdayaan pemuda baik pada tingkat persekolahan atau pendidikan lanjutan yang lengkap, dengan alasan bahwa pembelajaran yang layak sangat beragam.

Pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda sudah dapat menerjemahkan konsep pemberdayaan pemuda, akan tetapi masih banyak kendala khususnya dalam hal memperoleh informasi, kesenjangan kualitas organisasi pemuda di Indonesia yang masih tinggi. Pada basisnya praktis pemberdayaan pemuda sudah sejak lama diterapkan pada setiap organisasi pemuda yang menjadi lokasi riset, dari institusi tersebut dapat menghasilkan pemuda yang mampu beradaptasi dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif.

Pemberdayaan pemuda tidak dimaknai sebagai bentuk atau usaha mengembangkan potensi sebagian kelompok saja. Akan tetapi penelitian konstruksi makna pemberdayaan pemuda dan penguatan demokrasi yang inklusif, berorientasi untuk membangun makna pemberdayaan pemuda dalam perspektif PKn, dalam menghilangkan stigma pemuda anarkis dan pemuda oligarki serta mewujudkan demokrasi inklusif, diperlukan pemuda kritis dan partisipatif sebagai bentuk pemuda ideal melalui faktor-faktor pendukung yaitu: (1) pemuda yang kritis, (2)

praktis pembelajaran berfokus pada pemuda, (3) penguatan kompetensi kewarganegaraan, agar bisa meningkatkan inovasi pemuda, (4) pemuda yang mampu berpartisipasi aktif, (5) pemuda yang bertanggung jawab dengan pendapat yang dikeluarkan, (6) pemahaman mengenai demokrasi inklusif. Tentu indikator pemaknaan tersebut, merupakan modal sosial untuk memperkuat posisi pemuda dalam mewujudkan demokrasi inklusif terutama dalam kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan.

5.1.2 Simpulan Khusus

- a. Pada konteks realitas pemenuhan demokrasi yang inklusif di kalangan pemuda, yang berfokus pada pembukaan kebebasan berpendapat dan partisipasi belum optimal, dikarenakan peran pemuda saat secara kualitas dan pengetahuan belum menjadi indikator keberhasilan dari pemudanya. Dalam menunjang kualitas pemuda dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat dan mampu menulis *policy brief*, mempunyai keahlian dalam *public speaking*, pemikiran yang kritis, sehingga perlu pengembangan dari adanya *softskill* pemuda agar dapat mewakili kelompoknya masing-masing demi terwujudnya demokrasi yang inklusif.
- b. Adanya sebuah staf khusus milenial menjadi contoh yang bagus bagi pemuda, maka dalam hal ini, etika politik tidak boleh terasingkan didalam sebuah ruang diskusi. Faktor determinan yang menjadikan alasan adanya pemuda masuk dalam struktur politik adalah pemuda yang ingin mengabdikan dan pemuda yang menginginkan kekuasaan. Pemuda yang mempunyai niat baik, saat dia masuk dalam struktur pemerintahan maka tujuannya adalah untuk memperbaiki suara rakyat dan memperbaiki kebijakan daerah yang menurutnya bertentangan dengan norma dan kehendak rakyat.
- c. Kedudukan pemuda sangat strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan dan pembangunan bangsa. Pemberdayaan pemuda menjadi sebuah kegiatan dalam membangkitkan potensi dan dinamika pekerjaan kaum muda. Dimana kaum muda memiliki berbagai kemungkinan, dengan tujuan agar remaja dapat dibedakan sebagai sosok yang berguna dan memiliki karakter yang jelas seperti progresif, penuh harapan, terobosan, memiliki kualitas etika, dll. Perkumpulan yang biasanya dihadiri oleh para tokoh politik merupakan suatu hal yang sangat

penting, sebab hal tersebut dapat membantu pemuda dalam mewujudkan sebuah organisasi yang baik dan berkualitas. Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam rangka optimalisasi pembahasan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan prinsip pola (bergilir, bertahap dan tuntas) demi terwujudnya kepemudaan di Republik Indonesia yang baik.

5.2 Implikasi Teoritis

- a. Tersusunnya indikator ilmiah untuk memaknai pemberdayaan pemuda, sebagai upaya mengatasi distorsi makna pemberdayaan pemuda, akibat ada banyaknya fenomena banyak pemuda yang masuk dalam struktur pemerintahan.
- b. Terkonstruksinya makna pemberdayaan pemuda dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai berikut “pemberdayaan pemuda yang menghendaki terwujudnya kemerdekaan bagi pemuda, yang berbasis demokrasi inklusif, karena menjadikan pemuda sebagai subjek pembelajaran, sehingga kecenderungan dan kemampuannya dapat tumbuh secara ideal, membentengi kemampuan masyarakat, sehingga perkembangan dan kesantunan remaja dapat dipahami”.
- c. Peningkatan program pendidikan PKn bagi kaum muda, yang bergantung pada penguatan kemampuan metro dan administrasi yang ideal bagi kaum muda.
- d. Ada kesesuaian antara otoritas publik dan tanggung jawab pemuda untuk memuaskan hak istimewa pemuda, dengan kontribusi pemuda untuk mengikuti intisari sistem aturan mayoritas yang komprehensif, sangat penting untuk memahami kepuasan kebebasan pemuda sebagai bagian penting dari penduduk.

5.2 Implikasi Praktis

- a. Dirampungkannya kolaborasi *pentahelix* untuk mengatasi pembelajaran PKn pada Perguruan Tinggi yang bersifat pragmatis juga prosedural, karena melibatkan berbagai pihak (pemerintah, kaum intelektual, masyarakat atau komunitas, swasta juga media).

- b. Dirampungkannya rekomendasi pembelajaran PKn yang bersifat praktis di Perguruan Tinggi atau Sekolah, yaitu pembelajaran PKn di masyarakat atau *citizenship education* sebagai gerakan filantropi (cinta, kesukarelaan dan kesadaran), selaku wahana penguatan kompetensi kewarganegaraan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pada upaya memenuhi pemberdayaan pemuda selaku bagian integral dari warga negara, perlu dilandasi oleh komitmen serta konsistensi pemerintah juga pengelola demokrasi inklusif, agar bermanfaat positif bagi penguatan mutu sumber daya manusia Indonesia juga peningkatan inovasi pemuda.
- d. Pelayanan optimal tidak sebatas profesionalisme, tetapi menjadi aktivitas akademik serta kepemudaan, yang mampu mengarah terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga melahirkan sikap saling menghormati, menghargai bahkan transformasi kasih sayang, antara pendidik juga peserta didik, dalam lingkungan akademik.
- e. Realisasi demokrasi yang inklusif, perlu secara komprehensif merepresentasikan makna pemberdayaan pemuda, yang tidak terbatas pada kegiatan akademik, tetapi juga pada kegiatan aktivitas berdemokrasi pemuda, serta pengembangan minat bakatnya, sebagai upaya mewujudkan keadaban pemuda, selaku warga negara muda.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi adalah ide atau gagasan seorang ilmuwan, yang diperoleh melalui instrumen beserta konsekuensi pengujiannya, sehingga aturan mayoritas komprehensif pemerintah dapat memiliki manfaat positif untuk menangani segmen penghargaan kaum muda. Berdasarkan saran penelitian, akan diberikan kepada setiap lembaga termasuk, pembicara dan pemuda, sebagai penghibur yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan mayoritas komprehensif pemuda. Selain itu, strategi merupakan gagasan yang sifat pengakuannya sangat dipengaruhi oleh kekuatan yayasan, pembicara dan pemuda dalam menguraikan pendekatan sistem aturan mayoritas yang komprehensif. Maka untuk membatasi pelaksanaan pemerintahan kekuasaan mayoritas menyeluruh yang hanya bersifat stilasi, jelas akan diuraikan usulan-usulan eksplorasi, sebagai berikut:

- a. Organisasi Pemuda

Konsep pemberdayaan pemuda, mempengaruhi pengakuan kemajuan yang tidak hanya dilakukan dalam pergaulan, tetapi juga dalam iklim sosial, serta di berbagai yayasan, membuat mereka perlu membantu pengakuan penguatan pemuda. Jelas, bantuan kelompok masyarakat dan kelembagaan sangat penting, untuk menjadi wahana pembelajaran yang signifikan bagi kaum muda, sehingga menjadi modal keterlibatan sekaligus kemampuan bagi mereka di kemudian hari. Karena penguatan dibantu melalui asosiasi dan organisasi tentunya merupakan sarana penting untuk melihat liku-liku antara hipotesis pemuda dan kenyataan di lapangan. Jelas, berbagai jaringan dan lembaga perlu membantu kaum muda dalam memperoleh pembelajaran sejati, terutama situasi mereka sebagai kepala negara masa depan, dengan tujuan agar kaum muda perlu memalsukan kemampuan mereka, untuk memiliki pilihan untuk membawa negara ke puncak pembangunannya.

b. Pemuda

Sebagai subjek utama pemberdayaan pemuda, tentu pemuda perlu melihat bahwa penguatan pemuda merupakan wahana penting untuk menumbuhkan minat dan bakat pemuda, sehingga pemuda harus dinamis dalam meningkatkan sistem berbasis suara yang komprehensif. Jelas, berdasarkan sistem aturan mayoritas komprehensif pemuda, tidak hanya mewajibkan upaya untuk membentengi kemampuan kewarganegaraan pemuda, tetapi juga bekerja pada sifat setiap perkumpulan atau barisan pemuda di Indonesia, serta penguatan pemuda. Jadi aturan mayoritas yang komprehensif pemerintah berubah menjadi kendaraan penting untuk mengakui optimisme, kesadaran, kesukarelaan, dan kedermawanan pemuda, untuk melayani daerah, dan bahkan mengatasi isu-isu yang ada dalam iklim sosial. Karena pemuda perlu mengikuti dan memahami standar mereka, sebagai bagian dari kontribusi pemuda yang layak dalam kehidupan persahabatan dan politik, yang dinamis, karena pentingnya asosiasi pemuda, sebagai kekuatan politik yang menyesuaikan kekuatan sistem, maka mayoritas berkuasa. pemerintah dan keberhasilan dipercaya oleh daerah setempat, khususnya sistem berbasis suara yang komprehensif, untuk mewajibkan zat-zat ini.

c. Civitas Akademika PKn

Tentu masyarakat keilmuan PKn penting untuk menjadikan aturan mayoritas komprehensif pemuda sebagai wahana penting untuk membentengi sifat pembelajaran PKn di sekolah dan perguruan tinggi yang belum ideal. Selain itu, pembelajaran yang wajar dalam mayoritas komprehensif mengatur pemerintah yang bersifat akal sehat sehingga dapat diterapkan pada komponen logis PKn, khususnya kurikuler maupun sosial-sosial. Maka akan lebih bijak jika bidang akademik PKn ditingkatkan PKn berkonsentrasi pada penguatan pemuda, terutama pada metodologi, model, dan cara menghadapi pembelajaran PKn di sekolah dan perguruan tinggi saat ini, berbasis popularitas dan kreatif. Hal ini mengingat penguatan pembelajaran yang membumi bagi daerah, sehingga aspek sosial-sosial tidak hanya bersifat hipotetis, namun memiliki manfaat positif bagi kemajuan masyarakat. Sehingga secara praktis, civitas akademika PKn, baik program studi, spesialis, pengajar, maupun mahasiswa perlu mengembangkan pembelajaran dan penemuan PKn yang serbaguna untuk modernisasi, dan dapat menjadi wahana penting untuk mengakui kesetaraan pemuda, sehingga menjadi sebuah referensi logis untuk berbagai disiplin ilmu.

d. Kemenpora

Sebagai individu utama yang bertanggung jawab atas pengakuan aturan mayoritas komprehensif pemerintah, jelas Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu memastikan bahwa strategi tersebut benar-benar mempengaruhi berurusan dengan penghargaan segmen remaja, untuk memperluas intensitas negara secara universal. Sehingga Kementerian Pemuda dan Olahraga lebih siap untuk mengakui pemerintahan mayoritas yang komprehensif, terutama untuk pemuda, sehingga tidak berubah menjadi strategi yang terbatas pada megah, namun merupakan wahana untuk memperkuat keterampilan kewarganegaraan pemuda, serta langkah penting menuju pemerataan pemerataan sifat pendidikan maju di Indonesia. Jelas tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat vital, sehingga sistem aturan mayoritas bersifat komprehensif, sesuai dengan pentingnya penguatan pemuda, yang membutuhkan pemerataan serta modernisasi di bidang kepelatihan.

e. Peneliti Selanjutnya

Karena penelitian ini mengingat teknik fenomenologis, yang mencoba mengkonstruksi makna penguatan pemuda, secara menyeluruh dan representatif, dan membedah juga mencerminkan pengakuan pemenuhan hak-hak pemuda secara komprehensif oleh otoritas publik dan asosiasi pemuda terkait yang menjadi wilayah ujian, jelas eksplorasi ini tidak sedalam ulasan ini. kasus. Jadi para ilmuwan lebih lanjut, akan lebih bijaksana untuk membidik dalam mengeksplorasi zat-zat khusus, sehubungan dengan pelaksanaan penguatan pemuda dalam jadwal sehari-hari. Jelas, para ahli lebih lanjut juga perlu membedah isu-isu dalam strategi penguatan pemuda berbasis logis, untuk mengalahkannya masalah ini, dan bahkan mendorong ujian dan pembelajaran logis di setiap disiplin, sebagai jenis upaya bersama dengan penguatan pemuda. Ilmuwan selanjutnya benar-benar harus memberikan argumentasi mengingat hasil eksplorasi, dengan tujuan agar aturan mayoritas komprehensif yang masuk akal pembelajaran pemerintah dapat memiliki manfaat positif, baik bagi kaum muda, perusahaan dan masyarakat.